

**URGENSI SANKSI PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PELAKU  
PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK  
PEMULIHAN LINGKUNGAN  
(Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**FACHRUN NURRISYA A.**

**NIM. 115010100111099**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Penelitian** : **URGENSI SANKSI PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN (Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

**Identitas Penulis** :  
    **a. Nama** : **Fachrun Nurrisya A.**  
    **b. NIM** : **115010100111099**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian** : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal: 2 Februari 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

PROF. DR. INYOMAN NURJAYA S.H., M.S.  
19540925 198003 1 002

DR. MOH. FADLI, S.H., M.HUM  
19650401 199002 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

ENY HARJATI S.H., M.HUM  
19590406 198601 2 001

**URGENSI SANKSI PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PELAKU  
PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
UNTUK PEMULIHAN LINGKUNGAN  
(Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

**Fachrun Nurrisya Aini, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.S.,**

**DR. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: rissa.fhub@ymail.com

**ABSTRAK**

Sudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUDNRI 1945. Namun maraknya tindak pidana pencemaran lingkungan menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembuangan limbah B3 oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 juncto Pasal 104 UUPPLH. Tindak pidana oleh korporasi seringkali berdampak besar bagi lingkungan maupun bagi masyarakat, oleh karena itu korporasi pelaku pembuangan limbah B3 perlu dijatuhi pidana. Sanksi pidana sebagai satu-satunya pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi harus dimaksimalkan. Dari sinilah timbul urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan. Agar sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan dapat terlaksana maka harus dilakukan perbaikan regulasi hukum atau tindakan-tindakan lain yang dapat memaksimalkan sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan.

**ABSTRACT**

It is always a constitutional's right to have a good and a healthy environment as it is clearly mandated in Article 28 H, Indonesian's constitution, UUD NRI 1945. These days, there are so many criminal act about environmental pollution that caused disruption of the environment it self. One of the examples is

hazardous and toxic waste disposal (dumping) by corporation as it is regulated in Article 60 juncto Article 104 The Law number 32 year 2009 on Protection and Management of Environment. This criminal act by corporation sometimes give a big impact to environment and also the society, that is way the corporation which is the actors of hazardous waste disposal needs to be sentence. Fine as the only criminal sanction that can be sentenced to corporation, must be maximized. From this point of view, the urgency of criminal fine sanction for corporation which is the actors of hazardous waste disposal for environmental restoration arise. If we want to make fine sanction for environmental restoration happen, we must reevaluate the regulations or any other measures that can maximize the criminal fine sanction for environmental restoration.

## **I. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)<sup>1</sup> Pasal 163 ayat (3), lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya bebas dari limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Tidak hanya itu dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),<sup>2</sup> Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

Limbah terbagi menjadi limbah B3 dan Limbah Non-B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta

---

<sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

<sup>2</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>3</sup> Sedangkan limbah Non B3 adalah limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan Pasal 60 UUPPLH, setiap orang<sup>4</sup> dilarang melakukan pembuangan limbah (*dumping*) ke media lingkungan hidup tanpa izin. Definisi dari *dumping* atau pembuangan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi:

“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Pelanggaran atas pasal 60 UUPPLH sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikenai pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 104 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Selain itu, UUPPLH juga mengatur apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh suatu badan usaha atau korporasi yaitu yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 116 ayat (1) diatas terdapat dalam Pasal 118 dan 119. Pasal 118 menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan. Sedangkan Pasal 119 menegaskan terkait pidana tambahan yang dapat diberlakukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Pidana tambahan tersebut antara lain: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

---

<sup>3</sup> Disebutkan dalam pasal 1 angka 22 juncto pasal 1 angka 21 UUPPLH

<sup>4</sup> Disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 32 bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penanganan limbah B3 merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Teknologi pengolahan limbah B3 memang tersedia namun sangat mahal, sehingga dapat mengurangi keuntungan korporasi secara signifikan. Oleh karena itu, pengadaan dan pengoperasian sarana pengolah limbah B3 dianggap memberatkan bagi sebagian korporasi.<sup>5</sup> Semakin mahal biaya pengolahan limbah B3 menyebabkan korporasi-korporasi tersebut mulai mencari alternatif baru, salah satunya dengan cara membuang Limbah B3 tersebut ke media lingkungan hidup tanpa diolah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, korporasi yang melakukan pencemaran dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan akan berdampak luas baik di lingkungan maupun di masyarakat. Contoh kasus pencemaran lingkungan yang berdampak besar yaitu kasus *minamata* di Jepang, kasus pencemaran Teluk Buyat, atau kasus pembuangan limbah B3 oleh PT Dongwoo Environmental Indonesia (PT DEI). Sehingga pemidanaan kepada pengurus korporasi saja dinilai tidak cukup untuk menanggulangnya. Pemidanaan korporasi harus didasarkan pada prinsip *restorative justice* yang lebih mengutamakan pemulihan lingkungan akibat dari tindak pidana lingkungan itu sendiri.

Pengaturan tentang pemidanaan bagi korporasi sebagai pelaku pembuangan limbah B3 sudah jelas, korporasi dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, putusan pidana denda hanya dapat dipaksakan pemberlakuannya kepada terdakwa perseorangan saja sedangkan korporasi sangat sulit. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila sanksi pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh korporasi. Uang hasil dari pidana denda yang masuk ke kas negarapun juga tidak jelas

---

<sup>5</sup> Sugita, **Pergerakan Limbah B3 Batas Negara** (online), <http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara>, (29 Juni 2014).

digunakan untuk apa. Padahal, akan menjadi bermanfaat apabila uang denda tersebut dapat digunakan untuk membiayai tindakan pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah.

Lingkungan sudah tidak boleh lagi dianggap sebagai obyek yang dapat bebas dieksploitasi sesuai keinginan manusia untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Dalam memanfaatkan lingkungan kita harus melihat jangka panjang, lingkungan harus dirawat dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu perlu pengkajian secara khusus mengenai urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme pemidanaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3?
2. Bagaimana urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Mekanisme Pemidanaan Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah B3.**

Di zaman modern seperti sekarang, korporasi sangat berperan di kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak jarang berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat merupakan produk-produk korporasi. Selain itu korporasi juga berperan serta dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia serta dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,24 juta orang per Agustus 2014.<sup>6</sup> Sedangkan jumlah penduduk miskin per September 2014 mencapai 27,73 juta orang.<sup>7</sup> Begitu

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, **Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XVII, 5 November 2014**, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2014, hlm.2.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, **Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015** Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2014, hlm.1.

banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, sehingga keberadaan korporasi diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia tersebut.

Begitu besar perannya di masyarakat menyebabkan besar pula dampaknya di masyarakat apabila suatu korporasi melakukan suatu pencemaran lingkungan. Sebagai contoh pembuangan limbah B3 oleh korporasi yang berdampak besar bagi masyarakat maupun lingkungan adalah kasus *Minamata* di Jepang. Fakta yang terungkap dari kasus tersebut adalah *Chisso Chemical Corporation* membuang 600 ton merkuri secara bertahap selama 45 tahun di Teluk Minamata, Pulau Kyushu, Jepang. Dampak yang ditimbulkan yaitu air di Teluk Minamata terkontaminasi limbah B3 sehingga banyak ikan dan kucing yang mati selain itu penduduk Minamata baik dewasa maupun anak-anak banyak yang mandul, menderita penyakit aneh bahkan meninggal. Di tahun 1976 sekitar 120 penduduk Minamata meninggal karena keracunan merkuri dan 800 orang lainnya menderita penyakit yang tidak bisa dijelaskan apa penyebabnya. Tahun 1978, 8100 penduduk menderita sakit dan 1500 diantara yang diperiksa diketahui keracunan merkuri.<sup>8</sup>

Contoh kasus pencemaran lainnya adalah kasus Trail Shelter tahun 1938. Kasus ini melibatkan sebuah perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang beroperasi dekat sungai Kolombia, 10 mil menjelang perbatasan Kanada-Amerika Serikat. Setiap harinya pabrik tersebut menghasilkan 300 ton sulfur, karena terbawa angin, emisi tersebut bergerak ke arah wilayah Amerika Serikat yang menimbulkan penduduk Amerika Serikat mengalami sesak napas dan gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sehingga mengganggu kesehatan mereka.<sup>9</sup>

Di Indonesia juga terdapat kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi yang berdampak besar, salah satunya kasus pencemaran Teluk Buyat di Manado oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). PT NMR

---

<sup>8</sup> Enri Damanhuri, **Diktat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2009, hlm 7.

<sup>9</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, **Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 45-46.



tercatat sebagai industri penghasil limbah B3 yaitu merkuri (Hg) dan Arsen (As). Limbah B3 tersebut diduga dibuang ke Teluk Buyat yang akhirnya menyebabkan pencemaran di daerah tersebut. Di tahun 1996 pada rentang bulan Juli-Oktober, nelayan mendapati banyak ikan yang mati di pantai. Pada tanggal 19 Juni 2004, Yayasan Suara Nurani mengadakan pengobatan gratis pada warga khususnya di daerah Buyat Pante, Ratatotok Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan diagnosa yang disimpulkan oleh dr Jane Pangemanan, 93 orang yang diperiksa menderita keracunan logam berat. Meskipun banyak korban berjatuh, Majelis Hakim yang memeriksa kasus tersebut memutuskan bahwa kasus tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa Teluk Buyat terkontaminasi limbah B3. Sehingga terdakwa, PT NMR dan Richard Bruce Ness selaku Presiden Direktur PT NMR harus dibebaskan.<sup>10</sup>

Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Bekasi. Pada tanggal 11 Juni 2006 sekitar jam 13.00 waktu setempat, warga daerah sekitar mencium bau asam pahit dan menyengat di dekat Pabrik pengolah Limbah B3 yaitu PT DEI. Warga yang mencium bau asam tersebut banyak yang mengalami pusing, tenggorokan kering, dada sesak, gangguan pernafasan, perut mual, muntah bahkan pingsan. Berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dokter Ridwan Juansyah dari Rumah Sakit Medika Cikarang, menegaskan bahwa penyebab sakit warga Kampung Sempu tersebut karena menghirup gas Ammonia (NH<sub>3</sub>), Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>SO), dan gas Metana.<sup>11</sup> Selain itu tanah lapang di Kampung Sempu, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara yang dijadikan tempat pembuangan limbah B3 tersebut menjadi tercemar oleh bahan pelarut organik yang bersifat racun akut dan kronis.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3.

---

<sup>10</sup> Sukanda Husin, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 137.

<sup>11</sup> Yeni Widowati, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 2, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 156.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan saja namun masyarakat juga. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan pada kasus pembuangan limbah B3 dapat dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum lingkungan keperdataan, maupun penegakan hukum lingkungan kepidanaan.

Penegakan hukum lingkungan administrasi, menurut Achmad Santosa, terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu:

- a. Berupa kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Misalkan saja melalui pemberian izin dumping limbah B3, izin lingkungan dan sebagainya.
- b. *Court Review* terhadap putusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Misalkan dengan mengajukan gugatan administrasi dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 93 UUPPLH apabila:
  1. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  2. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  3. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan keperdataan dalam pembuangan limbah B3 lebih menekankan pada penyelesaian mengenai ganti kerugian secara materiil yang dilakukan melalui gugatan, baik gugatan perseorangan, gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi lingkungan, atau gugatan pemerintah dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan serta penjaminan tidak akan terulangnya pembuangan limbah B3. Pengaturan mengenai

penegakan hukum lingkungan keperdataan diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 92 UUPPLH. Berdasarkan UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi)<sup>12</sup> atau biasa dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilakukan melalui proses peradilan pidana dengan mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Pelaku tindak pidana ini dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi.<sup>13</sup> Penegakan hukum lingkungan kepidanaan diatur mulai dari Pasal 94 dengan ketentuan pidananya yang diatur mulai Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH. Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Berdasarkan jenis tindak pidananya, tindak pidana dalam hukum pidana lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dipidana berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan tanpa harus ada akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai dengan dilakukannya perbuatan yg dirumuskan dalam UUPPLH. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang syarat ppidanaannya karena adanya akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai bila akibat yang dilarang itu timbul.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 85 ayat (2), penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang disebutkan dalam UUPPLH.

<sup>13</sup> Korporasi mulai diakui sebagai subyek hukum pidana sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801.

<sup>14</sup> Bambang Sugiri, **Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 329.

Pemidanaan pelaku pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin adalah tindak pidana formil. Oleh karena itu pemidanaan pelaku pembuangan limbah B3 harus menggunakan upaya penyelesaian sengketa administrasi terlebih dulu dengan menggunakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan limbah B3 dan pencabutan izin pembuangan limbah B3.<sup>15</sup>

Pengaturan tentang pemidanaan bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 sudah jelas, korporasi dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, putusan pidana denda yang merupakan satu-satunya sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, hanya dapat dipaksakan pemberlakuannya kepada orang-perseorangan saja sedangkan pemberlakuan kepada korporasi sangat sulit. Selain itu tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila sanksi pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh korporasi menjadi permasalahan lain mengapa pemidanaan korporasi sangat sulit diterapkan.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas timbul karena UUPPLH sebagai pengaturan dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan beserta sanksi pidana maupun tindakan yang dapat diberikan kepada korporasi, sedangkan mekanisme pemidanaan tidak dijelaskan sama sekali. Pengaturan mekanisme pemidanaan bagi korporasi sangat diperlukan agar nantinya suatu sanksi pidana dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Karena dalam UUPPLH, sebagai peraturan khusus belum mengatur mekanisme pemidanaan khususnya pidana denda bagi korporasi, maka pengaturannya masih menggunakan peraturan pidana yang umum, yaitu KUHP. Sehingga mekanisme pemidanaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3 adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Disebutkan dalam penjelasan UUPPLH poin ke 6 bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Pertama-tama dilakukan terlebih dulu proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan. Pengaturan diatur dalam pasal 94 sampai pasal 96 UUPPLH. Dalam surat dakwaan harus dijelaskan siapa terdakwa. Harus jelas apakah korporasi atau pengurusnya atau dua-duanya.

Setelah itu Majelis Hakim memeriksa perkara akan memutus kasus tindak pidana tersebut melalui putusannya. Dalam amar putusannya harus jelas siapa terdakwa, korporasi atau pengurus atau dua-duanya. Putusan yang diberikan dapat berupa putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Apabila putusannya berupa putusan bebas atau lepas maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari penahanan. Sedangkan putusan pemidanaan harus menunggu putusannya memiliki kekuatan hukum tetap baru dapat melaksanakan eksekusi.

Apabila putusan pemidanaan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*<sup>16</sup> maka jaksa sebagai pelaksana putusan (Jaksa Eksekutorial) harus segera melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya. Setelah salinan putusan didapat, Jaksa meneliti putusan tersebut kemudian membuat surat panggilan untuk memanggil korporasi yang diwakili oleh direksinya (terpidana) ke Kantor Kejaksaan. Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda maka terpidana harus segera membayar pidana denda tersebut. Jika terpidana belum bisa melunasi pidana denda, maka terpidana harus membuat surat pernyataan kesanggupan membayar denda yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh terpidana serta jaksa yang menerima pernyataan.<sup>17</sup> Terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk melunasi denda tersebut. Jangka waktu pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang lagi paling lama 1 bulan apabila terdapat alasan yang kuat.

---

<sup>16</sup> *Inkracht* dalam arti terdakwa menerima putusan tersebut atau dalam waktu 7 hari terdakwa tidak menyampaikan argumennya dan tidak mengajukan upaya hukum lainnya. Hanya putusan pemidanaan saja yang dapat diajukan upaya hukum.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 224-227.

Uang hasil denda tersebut kemudian masuk ke kas negara sebagaimana diatur dalam pasal 42 KUHP yang berbunyi:

“Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.”

#### **B. Urgensi Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah B3 untuk Pemulihan Lingkungan Menurut Pasal 60 dan Pasal 104 UUPPLH**

Urgensi merupakan sebuah kata yang memiliki makna mendalam. Urgensi dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang membutuhkan sebuah tindakan yang cepat dan tanggap. Sebagaimana kita ketahui diatas, bahwa pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh korporasi dapat berdampak besar baik terhadap lingkungan maupun masyarakat disekitarnya. Sehingga diperlukan suatu tindakan yang cepat dan tanggap dalam menanggulangi tindak pidana pembuangan limbah B3 tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 angka 32 UUPPLH korporasi merupakan subyek hukum pidana lingkungan. Konsekuensi logisnya adalah segala ketentuan-ketentuan pidana dalam UUPPLH selain berlaku bagi setiap orang juga berlaku terhadap korporasi. Sehingga terhadap korporasi dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan maupun pemidanaan. Dalam proses peradilan ini, korporasi pelaku pencemaran lingkungan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan.<sup>18</sup>

Permasalahan timbul ketika sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ternyata belum bisa mengakomodasi ketentuan mengenai pemidanaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3. Seperti yang kita ketahui, dalam Pasal 104 tersebut sanksi pidananya bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga tidak bisa dipilih salah satunya. Apalagi tidak ada pasal khusus atau pengecualian bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

---

<sup>18</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

kepada korporasi hanya sanksi pidana denda saja. Berbeda dengan UU Tipikor,<sup>19</sup> UU Psikotropika,<sup>20</sup> UU Narkotika<sup>21</sup> dan UU TPPU<sup>22</sup> yang sudah menjelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda. Hal ini tentu menyulitkan proses pemidanaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3.

Sampai saat ini belum ditemukan kasus pembuangan limbah B3 oleh korporasi yang sudah menggunakan UUPPLH dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, bukan lagi menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).<sup>23</sup> Meskipun belum ada kasus pembuangan limbah B3 oleh korporasi yang berkekuatan hukum tetap, namun hal tersebut tidak membuktikan bahwa tidak ada kasus pembuangan limbah B3 di Indonesia. Apabila kita mencari berita-berita tentang pembuangan limbah B3 di media cetak maupun di media elektronik, maka kita akan menemukan banyak sekali kasus-kasus mengenai pembuangan limbah B3.

Korporasi merupakan suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu korporasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan produksinya harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam melakukan kegiatannya, korporasi pasti menghasilkan limbah industri. Limbah industri tersebut dapat berupa limbah non B3 atau limbah B3. Seperti yang kita ketahui pengaturan mengenai pengelolaan limbah semakin diperketat setiap tahunnya untuk melindungi lingkungan hidup. Pengaturan tersebut mewajibkan setiap korporasi penghasil limbah B3

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

untuk melakukan pengelolaan. Pengelolaan limbah B3 sampai ke Penyimpanan limbah B3 merupakan proses yang panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga dapat mengurangi pendapatan/keuntungan korporasi secara signifikan.<sup>24</sup> Jalan satu-satunya agar keuntungan korporasi tidak berkurang adalah dengan cara membuang limbah B3 tersebut.

Pembuangan limbah B3 sebenarnya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembuangan limbah B3 ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun masih banyak korporasi yang merasa keberatan dengan persyaratan dan biaya izin pembuangan limbah B3 tersebut. Biaya untuk memperoleh izin pembuangan limbah adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per permohonan.<sup>25</sup> Pada akhirnya hal ini menyebabkan banyak korporasi nakal yang melakukan pembuangan limbah B3 tanpa izin disembarang tempat. Tempat yang biasanya dijadikan pembuangan limbah B3 tanpa izin yaitu Hutan, Laut, Sungai, dan tempat-tempat sepi lainnya yang pengawasannya lemah.

Pidana denda terhadap korporasi dapat pula digunakan untuk membiayai tindakan pemulihan lingkungan.<sup>26</sup> Pidana denda ini dapat dijatuhkan dengan pemberian pidana tambahan atau tindakan tata tertib salah satunya dengan melakukan tindakan perbaikan akibat tindak pidana (tindakan pemulihan lingkungan). Hal tersebut diatur dalam UUPPLH Pasal 119 huruf b. UUPPLH mengenal adanya asas “pencemar membayar” yang berarti setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan jalan

---

<sup>24</sup> Sugita, *Op.Cit.*, ( 29 Juni 2014).

<sup>25</sup> Dijelaskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540.

<sup>26</sup> Disebutkan ditentukan umum pasal 1 angka 4 Permen LH No. 33 Tahun 2009, Pemulihan lingkungan disini berarti rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan fungsi dan peruntukannya semula.



menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggungjawab usaha yang menyebabkan pencemaran memang wajib melakukan upaya pemulihan dan menanggung biayanya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaannya. Namun bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan dan tidak melakukan upaya apapun untuk membantu upaya pemulihan lingkungan. Berdasarkan pasal 28 H UUD NRI, negara berkewajiban memenuhi hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 46 UUPPLH, dijelaskan bahwa pemerintah diharuskan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, dan dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya menurun karena mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Sehingga sudah sewajarnya apabila pemerintah membantu upaya pemulihan lingkungan dalam bentuk turut serta melakukan upaya pemulihan lingkungan, turut serta membiayai upaya pemulihan lingkungan, dan melakukan pengawasan terhadap upaya pemulihan lingkungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU PNBP),<sup>27</sup> penerimaan berdasarkan putusan pengadilan masuk kedalam kelompok penerimaan negara bukan pajak dan harus dimasukkan ke kas negara. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 42 KUHP yang menyatakan bahwa semua pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

UU PNBP dan KUHP mengatur bahwa segala pendapatan dari pidana denda masuk ke kas negara dan menjadi milik negara, namun UU PNBP dan KUHP tidak menjelaskan uang tersebut nanti digunakan untuk apa. UU PNBP hanya menjelaskan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>27</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Hal ini berarti uang dari pidana denda yang dibayarkan oleh korporasi pelaku pembuangan limbah B3 harus disetor ke kas negara dan pencairannya untuk pemulihan lingkungan hanya bisa dilakukan melalui tata cara pencairan dana APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 29 sampai Pasal 37

Proses pencairan dana APBN memang dipersulit, hal ini merupakan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta sebagai upaya untuk mencegah kebocoran keuangan negara.<sup>28</sup> Namun akan jauh bermanfaat apabila uang hasil denda tersebut dapat langsung digunakan untuk biaya pemulihan lingkungan. Karena semakin cepat proses pemulihan lingkungan dilaksanakan, maka akan semakin kecil pula dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan yang terkontaminasi begitupun dampak negatif yang dirasakan masyarakat juga semakin kecil. Namun hal tersebut dilarang oleh PP No.45 Tahun 2013 yang dinyatakan dalam pasal 41 ayat (2) yang berbunyi:

“Pendapatan Negara yang diterima Kementerian Negara/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.”

Melihat banyaknya kasus pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi juga dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat, membuat tindak pidana pembuangan limbah B3 perlu segera dilakukan tindakan untuk menanggulangnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi bahwa agenda penyelamatan tanah, air dan lingkungan di Indonesia merupakan agenda yang sifatnya sangat mendesak.<sup>29</sup> Tindakan tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembuangan limbah B3 antara lain melalui perbaikan regulasi hukum, perbaikan aparaturnya penegak hukum, dan perbaikan budaya korporasi dan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 98.

<sup>29</sup> Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi (Ed), **Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan**, Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 275.

Berdasarkan paparan diatas, muncullah urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan. Maksud dari pidana denda untuk pemulihan lingkungan ini adalah uang hasil dari pidana denda tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Agar sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan dapat terlaksana, maka diperlukan tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat pengaturan khusus berupa diperbolehkannya dana dari sanksi pidana denda tindak pidana pencemaran lingkungan (pembuangan limbah B3 termasuk didalamnya) dapat langsung digunakan untuk biaya pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak perlu melalui mekanisme pengambilan dana DIPA yang bersumber dari APBN. Karena semakin cepat upaya pemulihan lingkungan dilakukan maka dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat juga tidak akan terlalu besar. Uang hasil pidana denda ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara tersendiri khusus untuk pemulihan lingkungan.
- b. Pidanaan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi pelaku pembuangan limbah B3 harus berjalan efektif sehingga diperlukan perbaikan dalam hal regulasi hukumnya, aparat penegak hukumnya, dan masyarakat serta korporasinya.
- c. Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengawasan tindak pidana pembuangan limbah B3 dan upaya pemulihan lingkungan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan, masyarakat dapat sekaligus menjadi pengawas upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau korporasi.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mekanisme pidana korporasi pelaku pembuangan limbah B3 tidak diatur dalam UUPPLH, oleh karena itu ketentuan dalam KUHAP sebagai pengaturan umum hukum acara pidana

berlaku bagi pembedaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3 tersebut. Pembedaan yang dapat diterapkan kepada korporasi adalah sanksi pidana denda oleh karena itu ketentuan KUHP Pasal 270 sampai Pasal 273 mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda dengan menyesuaikan subyek hukum dalam pasal tersebut menjadi korporasi pelaku pembuangan limbah B3.

2. Begitu banyaknya kasus dan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh korporasi pelaku pembuangan limbah B3 memunculkan suatu urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3. Namun pemberian sanksi pidana denda bagi korporasi masih belum cukup untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara korporasi dan masyarakat. Oleh karena itu pemberian sanksi pidana denda harus digunakan untuk pemulihan lingkungan yang dilakukan pemerintah. Pemulihan lingkungan adalah suatu kepentingan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Agar sanksi pidana denda dapat digunakan untuk pemulihan lingkungan, maka diperlukan tindakan berupa pengaktifan pidana denda bagi korporasi, pembuatan kas negara khusus untuk pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemulihan lingkungan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pembaharuan dalam KUHP dan KUHP sebagai pengaturan dasar pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya perbaikan pengaturan dalam UUPPLH khususnya terkait pembedaan korporasi pelaku pembuangan limbah B3.
2. Aparatur penegak hukum harus mandiri dan netral dalam mengambil keputusan. Selain itu kemampuan aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa penuntut umum, penyidik) dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, khususnya tindak pidana pembuangan limbah B3 harus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ida Bagus Wyasa Putra, **Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi (Ed), **Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan**, Crespent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bogor, 2012.

Sukanda Husin, **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## DIKTAT

Enri Damanhuri, **Diktat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2009.

## JURNAL

Yeni Widowati, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 2, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

## DISERTASI

Bambang Sugiri, **Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

## DOKUMEN PEMERINTAH

Badan Pusat Statistik, **Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XVII, 5 November 2014**, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2014.

Badan Pusat Statistik, **Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015** Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2014.

## PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

**Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617.

**Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285.

**Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540.

## **WEBSITE**

Sugita, **Pergerakan Limbah B3 Batas Negara (online)**, <http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara>, ( 29 Juni 2014).